



# LAPORAN KEBERLANJUTAN

*(Sustainability Report) Tahun 2025*

## **PENJELASAN**

Selama periode laporan, Perumda BPR Kota Blitar belum meluncurkan produk maupun layanan baru, termasuk produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan. Oleh sebab itu, Perumda BPR Kota Blitar belum dapat melaporkan dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan, serta mitigasi yang dilakukan untuk menanggulangi dampak negatif.

## **PERUMDA BPR KOTA BLITAR**

Jalan Mastrip Nomor 75 Kota Blitar

# Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Pelapor

## Perumda BPR Kota Blitar

Pelaporan

Laporan Keberlanjutan (LAKB)

Nomor Referensi

1043912-1-LAKBA-R-A-20251231-010201-602560-27042026084658

Periode Data

2025

User ID Petugas Pelaporan

anak\_jiak@yahoo.co.id

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

4 / 4

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2026-04-27 08:46:58



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

## A. PENJELASAN STRATEGI KEBERLANJUTAN

Strategi keberlanjutan Perumda BPR Kota Blitar dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan, menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB), dan menyusun Laporan Keberlanjutan.

Prinsip Keuangan Berkelanjutan tersebut meliputi :

1. Prinsip keuangan berkelanjutan
2. Tata kelola yang baik
3. Pengelolaan risiko sosial dan lingkungan
4. Pemberian akses keuangan yang inklusif
5. Investasi yang bertanggung jawab
6. Komunikasi yang informatif
7. Pengembangan sektor unggulan prioritas

Sedangkan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan meliputi :

1. Mencakup sasaran, strategi, dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan keberlanjutan
2. Mencakup pengelolaan risiko sosial dan lingkungan

Perumda BPR Kota Blitar mulai menyesuaikan kebijakan yang mendukung pembiayaan berwawasan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) untuk memastikan keamanan teknologi layanan pembiayaan, mengembangkan layanan digital untuk meningkatkan efisiensi, serta melakukan kegiatan inklusi dan literasi keuangan. Implementasi ini sejalan dengan dukungan BPR pada pencapaian target Empat Pilar Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, yaitu Pilar Pembangunan Sosial, Ekonomi, Lingkungan, serta Tata Kelola.

Selain itu, budaya keberlanjutan juga ditegaskan melalui himbauan-himbauan di internal Perusahaan, misalnya untuk melakukan efisiensi listrik dan kertas, meningkatkan kepedulian pada lingkungan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, serta mengikuti perkembangan inovasi teknologi digital. Manajemen juga mendorong pola pikir dan perilaku karyawan untuk lebih komprehensif memahami aspek Lingkungan Sosial Tata Kelola (LST) dan mampu mengikuti perubahan dunia pembiayaan yang sangat cepat

## B. IKHTISAR ASPEK KEBERLANJUTAN (EKONOMI, SOSIAL, DAN LINGKUNGAN HIDUP)

### 1. Aspek Ekonomi (Form 01.00 Laporan Posisi Keuangan)

(Dalam Ribuan Rupiah)

No.	Pos Keuangan	31 Des 2023	31 Des 2024	31 Des 2025
1	Total Aset	24,297,541	25,893,601	28,272,045
2	Total Pendapatan	2,373,709	3,300,043	3,829,820
3	Total KYD	6,700,073	10,996,789	13,544,397
4	Total Kredit UMKM	2,210,744	2,444,183	1,882,017





## 2. Aspek Lingkungan Hidup

No.	KUB	Jenis Kegiatan	Keterangan
1.	Penghematan Energi Listrik.	Penggantian Bohlam dengan Bohlam LED.	Kantor Pusat dan Kantor Cabang BPR.
2.	Kegiatan Internal Berkelanjutan.	Penghematan Kertas dengan penggunaan teknologi informasi.	Kantor Pusat dan Kantor Cabang BPR.
3.	Program Literasi Keuangan Berkelanjutan.	Memberikan Program Literasi Keuangan Bank untuk para mahasiswa /pelajar.	TK, SD, SMP.

## 3. Aspek Sosial

No.	KUB	Jenis Kegiatan	Keterangan
1.	Kegiatan Internal Berkelanjutan.	Kampanye gaya hidup ramah lingkungan secara berkala kepada para karyawan sepanjang tahun.	Seluruh Jenjang Organisasi BPR.

Selama periode laporan, Perumda BPR Kota Blitar belum meluncurkan produk maupun layanan baru, termasuk produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan. Oleh sebab itu, Perumda BPR Kota Blitar belum dapat melaporkan dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan, serta mitigasi yang dilakukan untuk menanggulangi dampak negatif.

## C. PROFIL SINGKAT BPR

### 1. Visi dan Misi Keberlanjutan.

#### 1) Visi Berkelanjutan :

***Menjadikan Perumda BPR Kota Blitar sebagai BPR terbaik di wilayah Blitar Raya dan sebagai BUMD layanan keuangan terkemuka berbasis digital yang diperhitungkan keberadaannya serta peduli membantu kesemuanya mencapai kesejahteraan.***

#### 2) Misi Berkelanjutan :

- 1) ***Memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Blitar Raya.***
- 2) ***Percepatan kinerja, sinergi dan transformasi bisnis berbasis digital dan Sumber Daya Manusia yang handal.***
- 3) ***Mendorong pertumbuhan kredit yang wajar dan menerapkan prinsip-prinsip keuangan yang terukur dan berkelanjutan.***



2. Nama, alamat, nomor telepon, nomor faksimili, alamat surat elektronik (*e-mail*), dan situs web, Perumda BPR Kota Blitar (*Form 00.04 Data Kantor BPR*)

**Sandi BPR** : 602560  
**Nama** : Perumda BPR Kota Blitar  
Status : Kantor Pusat  
Alamat : Jalan Mastrip Nomor 75 Kepanjenkidul Kota Blitar  
No. Telepon : 0342-815533  
Email : apb\_08@yahoo.co.id  
Website : <https://bankkotablitar.com/>  
**Nama** : Kantor Kas PIAIH Perumda BPR Kota Blitar  
Status : Kantor Kas  
Alamat : Jalan Dr. Wahidin No. 105 (Masuk Lingkungan PIAIH)  
Kepanjenlor Kota Blitar.  
No. Telepon : 0342-6817576

3. Skala Usaha BPR

- 1) **Total Aset dan Total Kewajiban** (*Form 01.00 Laporan Posisi Keuangan*)

(Dalam Ribuan Rupiah)

No.	Pos Keuangan	31 Des 2025
1	Total Aset (Rp. ribu)	28,272,045
2	Total Kewajiban (Rp. ribu)	18,200,901
3	Total Ekuitas (Rp. ribu)	10,071,144

- 2) **Jumlah Karyawan**

- 1) Jumlah Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis kelamin	31 Des 2025
1	Laki-laki	10
2	Perempuan	11
	<b>Total</b>	<b>21</b>

- 2) Jumlah Karyawan Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	31 Des 2025
1	Dewan Komisaris (Dewan Pengawas)	2
2	Direksi	1
3	Pejabat Eksekutif	5
4	Pegawai Staf	6
7	Pegawai Dasar	7
	<b>Total</b>	<b>21</b>



3) Jumlah Karyawan Berdasarkan Usia

No.	Usia Karyawan	31 Des 2025
1	< 25	-
2	> 25 - 35	3
3	>35 - 45	14
4	>45 - 55	1
5	>55	3
	<b>Total</b>	<b>21</b>

4) Jumlah Karyawan Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	31 Des 2025
<b>1</b>	<b>Pegawai Tetap</b>	
	- Sarjana Strata 3 (S3)	-
	- Sarjana Strata 2 (S2)	2
	- Sarjana Strata 1 (S1)	8
	- Diploma 3 (D3)	1
	- SLTA	3
	- Lainnya	-
<b>2</b>	<b>Pegawai Tidak Tetap</b>	
	- Sarjana Strata 3 (S3)	-
	- Sarjana Strata 2 (S2)	-
	- Sarjana Strata 1 (S1)	6
	- Diploma 3 (D3)	-
	- SLTA	-
	- Lainnya (D1)	1
	<b>Total</b>	<b>21</b>

5) Jumlah Karyawan Berdasarkan Status Ketenagakerjaan

No.	Status	31 Des 2025
<b>1</b>	<b>Pegawai Tetap</b>	
	- Pemasaran	2
	- Pelayanan	3
	- Lainnya	9
<b>2</b>	<b>Pegawai Tidak Tetap</b>	
	- Pemasaran	3
	- Pelayanan	1
	- Lainnya	3
	<b>Total</b>	<b>21</b>



3) **Persentase kepemilikan saham** (Form 00.01 Data Kepemilikan BPR)

Susunan Pemegang Saham Perumda BPR Kota Blitar posisi 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

(Dalam Ribuan Rupiah)

No	Nama Pemegang Saham	Komposisi Saham		
		Lembar Saham	Nominal	%
1	Pemerintah Kota Blitar	-	8.000.000	100,00
<b>Total</b>		-	<b>8.000.000</b>	<b>100,00</b>

4) **Wilayah Operasional**

Jangkauan operasional Perumda BPR Kota tersebar di berbagai wilayah Kota Blitar dan Kabupaten sekitar yang berbatasan. Hingga akhir Desember 2025, BPR memiliki 1 Kantor Pusat, dan 1 Kantor Kas. Hingga saat ini, Perumda BPR Kota Blitar telah berupaya melayani pasar regional dan turut serta mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Adapun jenis nasabah / konsumen yang menggunakan produk layanan BPR meliputi debitur perorangan dan institusi.

5) **Produk, Layanan, dan Kegiatan Usaha BPR**

(Dalam Ribuan Rupiah)

No.	Produk Yang Memenuhi Kriteria Kegiatan Usaha Berkelanjutan	Jumlah rekening	Outstanding Per 31 Desember 2025
1	Penghimpunan Dana		
	a. Tabungan Masyarakat	5584	8,747,430
	b. Tabungan Pelajar (Pena)	1008	317,673
2	Penyaluran Dana		
	a. Kredit UMKM	65	1,882,017
	b. Kredit Lain yang Memenuhi Kriteria kegiatan Usaha Berkelanjutan	-	-

6) **Keanggotaan Pada Asosiasi**

Perumda BPR Kota Blitar terlibat dalam beberapa asosiasi guna mendapatkan informasi terkini terkait pengembangan industri pembiayaan dan hal-hal yang mempengaruhinya, perkembangan dunia usaha, serta risiko dan peluangnya.

No	Asosiasi	Peran	Tmt Keanggotaan
1	Perbarindo	Anggota	-
2	Perbamida	Anggota	-

7) **Perubahan yang bersifat signifikan**

- 1) Tidak terdapat penutupan atau pembukaan Kantor Cabang
- 2) Tidak terdapat perubahan struktur kepemilikan BPR



#### D. PENJELASAN DIREKSI

##### 1. Kebijakan Untuk Merespon Tantangan Dalam Pemenuhan Strategi Keberlanjutan

###### 1) Penjelasan Nilai Keberlanjutan Bagi Perumda BPR Kota Blitar.

Laporan keberlanjutan berisi kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berbasis pada prinsip Keuangan Berkelanjutan. Implementasi ini sejalan dengan respon Perumda BPR Kota Blitar dalam menyikapi perkembangan ekonomi global dan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Implementasi Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Melalui laporan ini, Direksi juga mengungkapkan dukungan pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). POJK Nomor 51/POJK.03/2017, senantiasa dijadikan pedoman bagi lembaga jasa keuangan dalam melakukan kegiatan usahanya dengan selalu berusaha untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan Perusahaan (ekonomi), sosial dan lingkungan hidup.

###### 2) Penjelasan Respon BPR Terhadap Isu Terkait Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Mengikuti dinamika bisnis yang semakin kompleks, Direksi Perumda BPR Kota Blitar menyusun strategi keberlanjutan yang sesuai dengan nilai-nilai Perusahaan. Selain memusatkan perhatian pada pencapaian target bisnis dan operasional, Perusahaan juga berupaya mengikuti arahan strategi keberlanjutan dan menyalurkan pembiayaan terhadap produk-produk ramah lingkungan. Dalam kegiatan sehari-hari, Perusahaan berusaha menerapkan kebiasaan-kebiasaan ramah lingkungan khususnya terkait dengan kegiatan hemat energi dan penghematan penggunaan kertas. Melalui laporan ini, Direksi menyampaikan kinerja keberlanjutan Perusahaan dan komitmen yang dijalankan dalam mengimplementasikan program-program keberlanjutan.

###### 3) Penjelasan komitmen pimpinan BPR dalam pencapaian penerapan Keuangan Berkelanjutan

Penyesuaian untuk mendukung implementasi Keuangan Berkelanjutan telah dilaksanakan sejak dibuatnya RAKB pada 2025. Sepanjang implementasi hingga tahun 2026, Perusahaan menitikberatkan pada penyesuaian kebijakan, dan melaksanakan pelatihan internal. Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan ini adalah kesadaran untuk mengubah pola pikir dan perilaku yang sejalan dengan prinsip-prinsip Keuangan Berkelanjutan. Selain itu, penyesuaian kebijakan dan pemetaan kegiatan pembiayaan juga memerlukan kerja sama antar unit kerja sehingga diperlukan koordinasi yang terus-menerus. Direksi berkomitmen menerapkan Keuangan Berkelanjutan, melaksanakan RAKB, serta mendukung pembangunan keberlanjutan melalui pembiayaan kepada para debitur. Direksi menyadari bahwa tantangan pencapaian Keuangan Berkelanjutan ini masih perlu dikelola dengan baik. Untuk itu, Direksi akan mengajak segenap karyawan dan pemangku kepentingan lainnya untuk bekerja sama membangun budaya keberlanjutan demi mencapai hasil yang optimal untuk tahun-tahun mendatang.



4) **Pencapaian Kinerja Penerapan Keuangan Berkelanjutan**

Pencapaian kinerja Keuangan Berkelanjutan yang disajikan dalam laporan ini mengandung tiga aspek, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan

2. **Penerapan Keuangan Berkelanjutan**

1) **Pencapaian Kinerja Penerapan Keuangan Berkelanjutan**

1) **Kinerja Aspek Ekonomi**

(Dalam Ribuan Rupiah)

No.	Pos Keuangan	Proyeksi 2025	Realisasi 2025	% Pencapaian
1	Total Aset	26,788,102	28,272,045	105.54
2	Total Tabungan	9,933,128	9,065,104	91.26
3	Total Deposito	5,854,900	7,367,195	125.83
4	Total KYD	17,269,782	13,544,398	78.43
5	Total Laba	621,751	303,465	48.81

2) **Kinerja Aspek Sosial**

- BPR telah berupaya memberikan layanan yang setara kepada semua debitur atas produk dan/atau jasa yang dimiliki serta menyampaikan informasi produk dan/atau jasa akurat kepada debitur.
- BPR telah memberikan pelatihan Keuangan Berkelanjutan yang diikuti oleh seluruh karyawan serta sosialisasi dan pelatihan antifraud untuk meningkatkan kesadaran pada perilaku bisnis yang etis dan bertanggung jawab.
- BPR telah melakukan kegiatan yang dapat menghasilkan dampak positif tentang produk keuangan terhadap masyarakat termasuk dalam program literasi dan inklusi keuangan
- BPR telah memberikan pendampingan dan penjelasan yang lengkap dan benar mengenai, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3) **Kinerja Aspek Lingkungan**

- BPR telah melakukan penghematan listrik dengan cara mematikan semua sarana kerja yang menggunakan arus listrik pada saat sudah selesai kerja atau setelah selesai aktivitas jam kerja.
- BPR telah mengatur penggunaan kendaraan dinas / operasional secara efisien.
- BPR telah mengurangi penggunaan kertas dalam kegiatan administrasi, antara lain dengan menggunakan korespondensi internal secara elektronik (*email/ online chat group*) dan bila terpaksa dapat menggunakan kertas bekas untuk koresponden yang bersifat rutin



2) **Penjelasan Prestasi Dan Tantangan Termasuk Peristiwa Penting Selama Periode Pelaporan.**

Perumda BPR Kota Blitar juga berupaya memperketat pengawasan terhadap kebijakan pemberian kredit dengan memperhatikan dampak negatif risiko yang ditimbulkannya, terutama pada kelestarian lingkungan.

3) **Strategi Pencapaian Target**

1) **Pengelolaan Risiko Atas Penerapan Keuangan Berkelanjutan Terkait Aspek Ekonomi, Sosial dan Lingkungan Hidup.**

Pengelolaan risiko atas penerapan Keuangan Berkelanjutan merupakan bagian dari risiko bisnis, dalam pelaksanaan pengawasan dibawah Direksi yang Membawahi Fungsi Kepatuhan. Pengelolaan risiko ini diharapkan dapat menjadi salah satu strategi untuk mencapai target kinerja Perusahaan

Strategi pengembangan bisnis kedepan terkait dengan penerapan keuangan berkelanjutan, Perumda BPR Kota Blitar akan melakukan langkah-langkah antara lain sebagai berikut:

- (a) Berupaya mencari mitra strategis yang peduli dan ramah kepada lingkungan dan sosial serta peduli kepada kelestarian lingkungan hidup.
- (b) Berupaya terus menjaga reputasi terhadap pihak antara lain; pemerintah sebagai regulator, para pemegang saham sebagai pendana dan masyarakat, hal ini dilakukan sebagai wujud aktivitas Perusahaan agar tidak berdampak sosial.
- (c) Berupaya memakai / menggunakan infra struktur yang ramah lingkungan

2) **Pemanfaatan Peluang Dan Prospek Usaha**

Peluang dan prospek usaha BPR antara lain berupa dukungan pemerintah kepada BPR untuk membiayai Kategori Kredit Usaha Berkelanjutan/KKUB sesuai dengan Pedoman Teknis POJK Nomor 51/POJK.03/2017 dan membuka akses keuangan inklusif. Perubahan bisnis yang terjadi dari yang sudah berjalan saat ini menjadi bisnis yang peduli lingkungan juga menjadi salah satu peluang bagi pemberian pembiayaan berwawasan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST). Selain itu, dalam hal teknologi, besarnya peluang untuk menerapkan proses digital dapat membantu meningkatkan keunggulan bersaing Perusahaan

3) **Penjelasan Situasi Eksternal Ekonomi, Sosial, Dan Lingkungan Hidup Yang Berpotensi Mempengaruhi Keberlanjutan BPR**

Tahun 2025 merupakan tahun dengan dinamika yang cukup kompleks, ditandai dengan kombinasi tantangan global yang berat dan upaya percepatan ekonomi domestik yang tangguh. Tahun 2025 bukan sekadar melanjutkan tren tahun sebelumnya, melainkan tahun yang lebih menantang (*challenging*) namun juga optimis dengan peluang percepatan. Perekonomian Indonesia diproyeksikan bertahan (*resilient*) dengan pertumbuhan yang stabil diatas 5%, didukung oleh





mesin domestik, meski harus berhadapan dengan gelombang ketidakpastian global yang lebih kompleks.

Seiring dengan hal tersebut, terdapat tantangan-tantangan yang harus dihadapi dan dilewati oleh Perumda BPR Kota Blitar. Menyadari hal ini, Perumda BPR Kota Blitar tetap berusaha menjalankan komitmen untuk mengimplementasikan strategi berkelanjutan yang telah disiapkan. Pemberlakuan Cadangan Kerugian Penyisihan Nilai (CKPN) merupakan tantangan baru bagi BPR untuk lebih baik dalam pemeliharaan kualitas kredit dan BPR harus menyesuaikan strategi dengan perkembangan kondisi dan memaksimalkan sumber daya yang dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaannya.

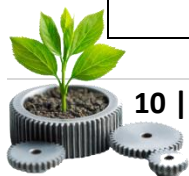
#### E. TATA KELOLA KEBERLANJUTAN

Dalam menerapkan GCG, Perusahaan mengacu pada 5 (lima) prinsip dasar tata kelola, yaitu: transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran dengan rincian :

Prinsip Dasar	Uraian	Penerapan Di Lingkup Perusahaan
Transparansi	Perusahaan berkomitmen untuk memberikan informasi secara jelas, terbuka, dan akurat untuk para pemangku kepentingan. Pengungkapan informasi yang transparan dilakukan oleh Perusahaan dengan tetap mematuhi perundang - undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan dan penjelasan Rencana Anggaran Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahun 2026</li> <li>- Penerbitan Laporan Tahunan 2025.</li> <li>- Penerbitan Laporan Keberlanjutan 2025.</li> <li>- Penerbitan Laporan Keuangan berkala yang meliputi laporan keuangan tahunan, triwulan dan bulanan.</li> <li>- Penerbitan Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola 2025.</li> </ul>
Akuntabilitas	Perusahaan menerapkan kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggung jawaban, sehingga pengelolaan bisnis dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Manajemen senantiasa membuat <i>job descriptions</i> yang jelas kepada semua pegawai dan menegaskan fungsi-fungsi dasar setiap bagian. Dengan demikian, seluruh organ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembagian tugas yang jelas antar organ Perusahaan, termasuk dengan merinci tugas dan wewenang KPM, Dewan Pengawas dan Direksi</li> <li>- Menerapkan <i>check and balance system</i>.</li> <li>- Memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran yang disepakati, konsisten</li> </ul>



Prinsip Dasar	Uraian	Penerapan Di Lingkup Perusahaan
	Perusahaan memiliki kejelasan hak dan kewajiban, fungsi dan tanggung jawab, serta kewenangannya dalam setiap kebijakan Perusahaan.	dengan nilai-nilai Perusahaan ( <i>corporate core values</i> ), sasaran usaha, dan strategi Perusahaan - Memiliki sistem <i>reward and punishment</i> .
Pertanggung jawaban	Pertanggungjawaban diwujudkan dengan dipenuhinya kewajiban Perusahaan dalam menjalankan peraturan perundangan yang berlaku yang terkait dengan bidang usahanya, antara lain ketentuan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, kewajiban perpajakan, kesehatan, dan keselamatan kerja, serta persaingan usaha	- Mematuhi ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. - Melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan tepat waktu. - Melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan ( <i>corporate social responsibility</i> ). - Melaksanakan kewajiban keterbukaan informasi sesuai regulasi yang berlaku.
Independensi	Kemandirian atau independensi adalah sebuah keadaan dimana Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh / tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan, serta prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Dalam pelaksanaannya, kemandirian atau independensi dapat diwujudkan dengan selalu menghormati hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta wewenang masing-masing organ.	- Saling menghormati hak, kewajiban, tugas, wewenang, serta tanggung jawab di antara organ Perusahaan - Pemegang Saham tidak melakukan intervensi terhadap pengurusan Perusahaan - Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh pegawai senantiasa menghindari terjadinya benturan kepentingan dalam setiap pengambilan keputusan dengan menandatangani pakta integritas. - Penerapan kebijakan dan sistem yang meminimalkan terjadinya benturan kepentingan.
Kewajaran	Kewajaran diartikan sebagai keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul	Kewajaran diartikan sebagai keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul





Prinsip Dasar	Uraian	Penerapan Di Lingkup Perusahaan
	berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keadilan dapat tercermin dalam pemberian kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam memberi masukan, saran dan pendapat bagi kepentingan Perusahaan. Sedangkan kesetaraan dapat terwujud dengan memberikan penghargaan dan penghormatan sesuai dengan kinerjanya tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin.	berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keadilan dapat tercermin dalam pemberian kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam memberi masukan, saran dan pendapat bagi kepentingan Perusahaan. Sedangkan kesetaraan dapat terwujud dengan memberikan penghargaan dan penghormatan sesuai dengan kinerjanya tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin.

**1. Uraian Mengenai Tugas Bagi Direksi Dan Dewan Komisaris (Dewan Pengawas), Pegawai, Pejabat Dan/Atau Unit Kerja Yang Menjadi Penanggung Jawab Penerapan Keuangan Berkelanjutan**

Satuan Kerja	Tugas & Tanggung Jawab
Dewan Komisaris (Dewan Pengawas)	Mengawasi Kebijakan Direksi Dalam Penerapan Keuangan Berkelanjutan.
Direksi	Pengarah atau Pengambil Keputusan / Kebijakan Penerapan Keuangan Berkelanjutan.
Unit Kerja Manajemen Risiko	Melakukan penyesuaian analisis manajemen risiko Keuangan Berkelanjutan sesuai ketentuan Regulator.
Unit Kerja Pemasaran	Merencanakan peningkatan portofolio pembiayaan, investasi atau penempatan pada instrumen keuangan atau proyek yang sejalan dengan penerapan Keuangan Berkelanjutan.
Unit Kerja SDM	Menyusun agenda pengembangan kapasitas SDM mengenai Keuangan Berkelanjutan.
Unit Kerja Operasional	Menyusun Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report).



2. **Pengembangan kompetensi yang dilaksanakan terhadap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris (Dewan Pengawas), pegawai, pejabat dan/atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab Penerapan Keuangan Berkelanjutan**
  - a. Salah satu langkah strategis untuk pengembangan kompetensi internal Perusahaan dalam menunjang kegiatan keuangan berkelanjutan adalah dengan membuat modul pelatihan Keuangan Berkelanjutan berbasis *e-learning*. Penyusunan *e-learning* ini melibatkan beragam pemangku kepentingan. Modul ini akan menjadi salah satu sarana pengembangan kompetensi Keuangan Berkelanjutan pada pekerja (Pegawai / SDM Perusahaan).
  - b. Perusahaan akan berupaya mengikutsertakan pejabat/pegawai untuk mengikuti training terkait AMDAL / manajemen risiko sosial dan lingkungan hidup, sehingga pegawai/pejabat dapat memahami dengan baik konsep dasar Kegiatan Keuangan Berkelanjutan.
  
3. **Prosedur BPR dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko atas penerapan Keuangan Berkelanjutan terkait aspek ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup, termasuk peran Direksi dan Dewan Komisaris dalam mengelola, melakukan telaah berkala, dan meninjau efektivitas proses manajemen risiko BPR.**
  - a. Dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan, terdapat risiko-risiko yang muncul seiring dengan pelaksanaannya. Risiko yang teridentifikasi, salah satunya adalah penyesuaian syarat pengajuan kredit untuk meningkatkan portofolio hijau. Dalam suatu kesempatan nantinya, Perumda BPR Kota Blitar akan berusaha menerapkan manajemen risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) dalam proses penilaian kelayakan kredit usaha yang diberikan.
  - b. Implementasi manajemen risiko lingkungan, sosial, & tata kelola (LST), antara lain:
    - 1) Melakukan verifikasi debitur yang masuk dalam kategori konstruksi berwawasan hijau antara lain:
      - a) Bidang usaha yang memanfaatkan sumber daya alam secara efektif, efisien, dan bijaksana
      - b) Bidang usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan kesempatan kerja;
      - c) Bidang usaha yang mampu meminimalkan kerusakan dan pencemaran lingkungan.
    - 2) BPR akan melaksanakan tindakan terhadap debitur yang belum melengkapi izin lingkungan, antara lain:
      - a) Menyusun kebijakan untuk mensyaratkan kepada calon debitur baru yang berwawasan lingkungan, sosial dan tata kelola (LST), antara lain dengan memberikan nilai rating lebih tinggi dibandingkan dengan calon debitur yang



belum berwawasan lingkungan, sosial dan tata kelola (LST) dalam penilaian debitur.

- c. Jajaran Dewan Komisaris (Dewan Pengawas) dan Direksi turut mengawasi jalannya penerapan Keuangan Berkelanjutan. Cakupan pengawasan terdiri dari pengendalian risiko, pelaksanaan, kebijakan, dan perkembangan Keuangan Berkelanjutan. Secara langsung, Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan juga mengawasi penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB), penyesuaian kebijakan kredit, visi dan misi keberlanjutan, serta penyusunan laporan keberlanjutan.

#### 4. Pemangku kepentingan

- a. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang berhubungan dan berpengaruh pada kegiatan usaha dan keberlanjutan Perusahaan (Perumda BPR Kota Blitar) secara signifikan. Interaksi yang terbangun antara Perumda BPR Kota Blitar dan pemangku kepentingan dapat melalui berbagai aktivitas, keperluan, dan unit bisnis terkait.
- b. Manajemen melakukan pemetaan pemangku kepentingan melalui tingkat kedekatan dan tingkat kepentingan. Secara internal, pendekatan dengan pemangku kepentingan dibangun melalui dialog pada berbagai saluran komunikasi dan rapat. Secara eksternal, pendekatan dilakukan melalui, pertemuan bisnis, atau sosialisasi/seminar.
- c. Perusahaan melakukan pendekatan terhadap pemangku kepentingan melalui hubungan profesional, untuk mendapatkan masukan dan saran guna meningkatkan pelayanan. Selain itu, pendekatan pada pemangku kepentingan juga diharapkan bisa menggali informasi dan meningkatkan pemahaman Perusahaan terhadap kebutuhan mereka, termasuk pengelolaan kinerja keberlanjutan.

#### 5. Permasalahan yang dihadapi, perkembangan, dan pengaruh terhadap penerapan Keuangan Berkelanjutan

- a. Penerapan Keuangan Berkelanjutan membutuhkan persiapan yang matang dan banyak penyesuaian. Pada praktiknya, Perusahaan membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal.
- b. Pengaruh penerapan Keuangan Berkelanjutan pada Perusahaan adalah adanya perubahan cara pandang dalam menjalankan kegiatan usaha, serta perilaku bisnis sehari-hari. Perumda BPR Kota Blitar akan terus menyesuaikan prinsip-prinsip Keuangan Berkelanjutan tahap demi tahap untuk menjadi lebih baik.
- c. Melalui penerapan GCG, Perusahaan berupaya untuk menjaga kepercayaan nasabah, pemegang saham, dan para pemangku kepentingan lain. Perumda BPR Kota Blitar meyakini bahwa penerapan GCG dapat meningkatkan daya saing Perusahaan dan menciptakan *nilai ekonomi yang berkelanjutan* bagi para pemangku kepentingan di tengah dinamika perubahan iklim usaha serta persaingan yang semakin ketat.



**F. KINERJA KEBERLANJUTAN**

**1. Kegiatan membangun budaya keberlanjutan di internal BPR**

- a. Guna membangun budaya keberlanjutan, Perusahaan secara konstan memasukkan value keberlanjutan dalam kegiatan yang dilaksanakan seperti meminimalkan penggunaan kertas, sosialisasi penggunaan botol minum selama rapat dan pengenalan mengenai pengelolaan sampah padat di lingkungan kantor. Budaya keberlanjutan mulai dibangun dengan melibatkan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam kegiatan keseharian dalam bekerja.
- b. Sebagai langkah awal perjalanan menerapkan Keuangan Berkelanjutan, BPR telah melakukan sosialisasi Keuangan Berkelanjutan untuk seluruh SDM, termasuk jajaran Direksi dan Komisaris (Dewan Pengawas). Sosialisasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran budaya keberlanjutan dan pentingnya penerapan prinsip keberlanjutan, baik untuk semua SDM, dan debitur, serta mitra usaha agar bersama-sama mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

**2. Kinerja ekonomi dalam 3 (tiga) tahun terakhir**

Pos	Proyeksi 2023	Realisasi 2023	Proyeksi 2024	Realisasi 2024	Proyeksi 2025	Realisasi 2025
Total Aset	25,051,122	25,864,544	25,051,122	25,864,544	26,788,102	28,272,045
Total Tabungan	10,086,393	9,026,968	9,332,679	9,280,327	9,933,128	9,065,104
Total Deposito	6,569,519	4,847,750	5,340,490	4,251,700	5,854,900	7,367,195
Total KYD	11,024,841	6,700,073	12,479,842	11,181,940	17,269,782	13,544,398
Total Ekuitas	13,426,275	9,759,283	10,005,426	10,116,870	10,304,716	10,071,144
Laba Tahun berjalan	768,904	103,354	412,244	440,757	621,751	303,465

Perumda BPR Kota Blitar mencatat pertumbuhan kredit yang positif. Dalam penyaluran kredit tersebut, sekitar 14% ada pada segmen *Kredit UMKM*. Melalui penyaluran kredit itu, Perumda BPR Kota Blitar turut mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan penerapan Keuangan Berkelanjutan di Indonesia seperti yang nampak pada tabel dibawah ini :

Pos	Proyeksi 2023	Realisasi 2023	Proyeksi 2024	Realisasi 2024	Proyeksi 2025	Realisasi 2025
Usaha Mikro	441,598	689,191	798,650	953,648	2,043,707	902,028
Usaha Kecil	6,232,562	995,233	1,796,962	1,139,488	2,622,757	807,637
Usaha Menengah	4,514,701	526,320	9,884,229	351,047	894,121	172,351

**3. Kinerja Sosial**

**1. Komitmen BPR**

Perumda BPR Kota Blitar berkomitmen untuk memberikan kesempatan dan jenjang karir yang sama sesuai dengan kompetensi bagi pegawai perempuan dan laki-laki. Perusahaan berkomitmen untuk tidak mempekerjakan pegawai di bawah umur sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan. Dalam memberikan layanan jasa





keuangan maupun memasarkan produk-produk pembiayaan, BPR menerapkan azas kesetaraan. Bagi seluruh nasabah dan debitur eksisting, maupun calon nasabah dan calon debitur akan dilayani dengan baik tanpa diskriminasi. Hal ini juga berlaku pada nasabah dan debitur berkebutuhan khusus/disabilitas Perusahaan akan tetap memberikan pelayanan produk sesuai dengan kebutuhan dan kesanggupan mereka.

## 2. Ketenagakerjaan

Dalam manajemen sumber daya manusia, perusahaan berkomitmen untuk memberikan kesempatan dan jenjang karir yang sama sesuai dengan kompetensi karyawan, baik Wanita maupun pria. Kesempatan yang sama berlaku bagi setiap karyawan tanpa memandang latar belakang maupun gender.

No.	Gender	Jumlah	Persentase
1	Karyawan Pria	10	47.62%
2	Karyawan Wanita	11	52.38%
	Total Karyawan	<b>21</b>	100.00%

No.	Jabatan	2023		2024		2025	
		Pria	Wanita	Pria	Wanita	Pria	Wanita
1	Dewan Komisaris	2	-	2	-	2	-
2	Direksi	1	-	1	-	1	-
3	Pejabat Eksekutif	2	3	2	3	2	3
4	Pegawai Staf/Pelaksana	2	5	2	5	2	4
5	Pegawai Dasar	4	0	4	0	3	4
	<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>

BPR akan berupaya memberikan imbal jasa pekerjaan atau remunerasi sesuai dengan beban dan posisi kerja. Pembayaran remunerasi juga merupakan bagian dari nilai ekonomi langsung yang didistribusikan. Pemberian remunerasi diupayakan tidak membedakan gender. Namun, perbedaan dapat terjadi karena status ketenagakerjaan, keahlian, jenjang jabatan, prestasi kerja, dan lama kerja. Bentuk remunerasi antara lain gaji pokok, tunjangan, dan insentif lainnya.

Manajemen SDM akan berupaya memperhatikan kualitas dan kompetensi setiap karyawan. Setiap tahunnya, Perusahaan akan mengusahakan pengadaan pelatihan dan pengembangan kemampuan untuk seluruh karyawan. Perusahaan juga akan mengirimkan karyawan untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh lembaga eksternal. Pelatihan dan pengembangan kemampuan karyawan dilakukan antara lain melalui metode webinar (online), pembelajaran kelas (in class), on the job training (OJT), dan diskusi grup.



### 3. Masyarakat

Pemerintah memiliki komitmen untuk memperkenalkan dan memberikan edukasi pengelolaan keuangan pada seluruh lapisan masyarakat. Kegiatan inklusi dan literasi keuangan menjadi kewajiban bagi semua perbankan. Karenanya Perumda BPR Kota Blitar akan melakukan kegiatan inklusi dan literasi keuangan secara berkala untuk memberikan edukasi mengenai Lembaga Jasa Keuangan kepada masyarakat

Setiap nasabah yang mendapatkan dampak negatif atas layanan Perusahaan, berhak menyampaikan pengaduan. Di Perumda BPR Kota Blitar, pengaduan nasabah, termasuk masyarakat, dibedakan menjadi:

1. Masyarakat selaku nasabah yang melaporkan hal-hal seperti pengaduan, dan ketidakpuasan terkait produk dan layanan kredit, dugaan fraud yang dilakukan oleh karyawan, dan lainnya;
2. Masyarakat umum nasabah maupun bukan nasabah, yang melaporkan pengaduan atas kegiatan BPR yang bersinggungan dengan mereka, seperti kegiatan pemasaran produk dan layanan pembiayaan, kegiatan sosial, dan lainnya.

Untuk memberikan respon atas pengaduan yang diterima, Perusahaan memiliki mekanisme dan unit yang menangani pengaduan nasabah. Pengaduan dapat disampaikan melalui email BPR atau *call centre* BPR. Keberadaan Unit Layanan Pengaduan Konsumen akan terus meningkatkan kualitas dalam menindaklanjuti setiap pengaduan, serta menyelesaikan setiap pengaduan dengan baik, serta memberikan perlindungan kerahasiaan pelapor sesuai ketentuan.

### 4. Kinerja Lingkungan

Kantor pusat dan kantor kas yang dimiliki BPR, berada di wilayah perkotaan (Wilayah Kota Blitar). Dengan demikian, Perusahaan memastikan bahwa tidak ada wilayah operasional yang berdekatan atau berada di daerah konservasi atau yang memiliki keanekaragaman hayati. Hingga akhir tahun 2025, Perusahaan juga belum melakukan identifikasi pada debitur terkait upaya mereka pada pelestarian keanekaragaman hayati. Meskipun tidak bersinggungan langsung dengan lingkungan hidup, Perumda BPR Kota Blitar mendukung kelestarian lingkungan dengan mengajak masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari pemanasan global.

Hingga akhir tahun 2025, Perusahaan tidak menerima pengaduan terkait dampak negatif lingkungan hidup dari pemangku kepentingan, termasuk tidak adanya informasi terkait tumpahan yang mungkin terjadi pada aktivitas usaha debitur. Perusahaan juga tidak





mendapat laporan pengaduan lingkungan yang berasal dari debitur atau nasabah. Dengan demikian, Perusahaan tidak mengeluarkan biaya akibat denda atau ketidakpatuhan pada pelestarian lingkungan hidup.

**G. VERIFIKASI TERTULIS DARI PIHAK INDEPENDEN**

Belum terdapat Verifikasi Tertulis Dari Pihak Independen terkait Laporan Keberlanjutan Perumda BPR Kota Blitar Posisi 31 Desember 2025.

**H. LEMBAR UMPAN BALIK (FEEDBACK) UNTUK PEMBACA**

Belum terdapat umpan balik dari pembaca terkait Laporan Keberlanjutan Perumda BPR Kota Blitar Posisi 31 Desember 2025.

**I. TANGGAPAN LK, EMITEN, ATAU PERUSAHAAN PUBLIK TERHADAP UMPAN BALIK LAPORAN TAHUN SEBELUMNYA**

Laporan Keberlanjutan posisi 31 Desember 2025 ini dilaporkan oleh Perumda BPR Kota Blitar sesuai ketentuan permodalan yang dipersyaratkan.

Demikian Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) Tahun 2025 sesuai dengan Lampiran II POJK Nomor 51/POJK.03/2017 kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kota Blitar, 21 April 2026  
Perumda BPR Kota Blitar

Dewan Pengawas



**Mokhamad Sidik**  
Ketua

Direksi



**Edy Prasetyo**  
Direktur Utama